



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DUPAK MELALUI SISDM SERTA SOSIALISASI PERMENPANRB NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA**



**PEMANTAUAN TLRHP SEMESTER I TA 2019 PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 s.d. 4 Juli 2019, melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2019 atas 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka dengan pembacaan sambutan Kepala Perwakilan, yang dalam hal ini diwakili Kepala Sekretariat Perwakilan, Ibu Mardiah. Kegiatan ini diikuti seluruh tim pemeriksa dan Inspektorat masing-masing entitas.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari entitas untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi (status 1), tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (status 2), rekomendasi belum ditindaklanjuti (status 3), dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (status 4). Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, diperlukan persetujuan Anggota VI BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. Hasil Pembahasan TLRHP sekaligus penutupan yang dibacakan oleh Bapak Nurul Huda sebagai Ketua Tim Senior adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (status 1) mencapai 85,48%;
2. Ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut (status 2) mencapai 11,45%;
3. Belum ditindaklanjuti (status 3) sebesar 2,21%;
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (status 4) sebesar 0,86%.

Sehubungan dengan dirilisnya modul penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) via Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) BPK-RI, Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa Biro SDM BPK RI untuk melaksanakan pendampingan penyusunan dan penilaian atas DUPAK yang telah dientri. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2019 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, pukul 08.30 WIB - 15.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Sekretariat Perwakilan, Ibu Mardiah. Dalam sambutannya, Ibu Mardiah mengapresiasi atas dirilisnya modul penyusunan DUPAK via SISDM. Dengan adanya modul ini, Pemeriksa lebih mudah, paperless, lebih efektif, dan lebih efisien dalam menyusun DUPAK. Ibu Mardiah juga menekankan agar setiap Pejabat Fungsional Pemeriksa segera menyampaikan DUPAK Semester I TA 2019 melalui modul yang telah ada pada SISDM. Selanjutnya, Bapak Mohammad Ainun Najib, bersama Sekretariat dan Tim Penilai dari Subbagian Analis Jabatan Fungsional Pemeriksa Biro SDM BPK RI memberikan pendampingan kepada Pemeriksa/Auditor, mulai dari penyusunan DUPAK sampai dengan penilaian DUPAK. Di sela-sela pendampingan, Bapak Mohammad Ainun Najib juga mensosialisasikan garis besar PermenpanRB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan perbedaannya dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa.

**SOSIALISASI SIPTL V2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan entitas, BPK membuat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). SIPTL merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. BPK terus mengembangkan aplikasi tersebut guna mewujudkan visi BPK, yaitu **menjadi pendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat**. Terakhir, bulan Mei 2019, BPK telah merilis SIPTL versi 2.



Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, dengan mengundang Biro TI BPK untuk melaksanakan sosialisasi penggunaan SIPTL v2 kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh inspektur beserta jajaran. Dalam paparannya, Biro TI menyampaikan fitur-fitur baru pada SIPTL v2, yaitu redesign tampilan aplikasi agar lebih user dan mobile friendly, dashboard yang lebih optimal, penambahan struktur pengguna yang dapat menunjang proses tindak lanjut hingga level satker (inoper satker), dan penyempurnaan proses tindak lanjut, dimana entitas dapat melakukan penambahan atau modifikasi TL setelah usulan TL dikirimkan ke BPK dengan syarat bahwa proses validasi belum melewati eselon II di BPK.

Dengan adanya aplikasi versi 2 ini, permasalahan-permasalahan yang ada pada versi sebelumnya telah terselesaikan sehingga semakin memudahkan entitas dalam mengolah data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semakin meningkat.

**SOSIALISASI SIAP MONITORING LKPD**



Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, mutlak diperlukan standar pengendalian mutu agar kualitas pemeriksaan yang dilakukan tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup seluruh unsur, tidak terbatas pada hal-hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan tetapi harus didukung oleh sistem yang dibentuk antara lain aplikasi untuk melaksanakan pengendalian mutu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu SiAP Monitoring LKPD.

Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan selaku *leading sector* telah melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi SiAP Monitoring LKPD. Peserta sosialisasi ini adalah para Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

SiAP Monitoring LKPD merupakan aplikasi berbasis web yang membantu tim pemeriksa dalam memonitoring setiap proses pemeriksaan LKPD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini memuat jadwal pemeriksaan, penetapan materialitas, analisis temuan, dan perumusan opini. Dengan adanya aplikasi ini permasalahan-permasalahan internal antara lain monitoring atas jumlah entitas yang sangat banyak serta ketidakefisienan waktu proses pemeriksaan mulai dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proses pemeriksaan dapat diminimalisir. Lebih lanjut, dengan adanya aplikasi ini, kolaborasi tim pemeriksa di lapangan semakin meningkat, proses quality control dan quality assurance semakin meningkat, dan audit trail secara otomatis semakin tersedia.



## EDUKASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI YANG TERDAMPAK PAPARAN ASAP DI LINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai yang terdampak paparan asap, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro SDM BPK RI melaksanakan edukasi dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Edukasi kesehatan diberikan oleh Ibu dr. Henny Kurniati, M.Gizi, CH. Edukasi meliputi paparan terkait gejala penyakit yang dapat terjadi akibat kabut asap sampai dengan upaya primer, sekunder, dan tersier dalam rangka mencegah dan menangani dampak asap pada kesehatan. paru-paru.

Kegiatan ini dihadiri oleh segenap karyawan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mengikuti paparan edukasi, segenap karyawan melaksanakan spirometry test. Tes ini berguna untuk mengevaluasi fungsi paru dan mendiagnosis kondisi paru-paru. Dengan adanya pemeriksaan ini, segenap karyawan mengetahui langkah preventif dan represif yang perlu dilakukan untuk mencegah disfungsi dan kerusakan paru-paru.

## Diklat Achievement Motivation dan Diklat Fraud Auditing



Dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia yang kompeten dan tangguh dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan serta berprestasi dalam bidang pekerjaan masing-masing, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) soft skill yaitu diklat Achievement Motivation. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 4 September 2019 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan diikuti oleh 30 peserta. Bertindak sebagai instruktur yaitu Bapak Pulung Tri Anggoro, S.Psi. dari Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja untuk mendukung keberhasilan pekerjaan.

Selain itu, Untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa terkait usaha mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, Pemeriksa harus dibekali pengetahuan dan wawasan dalam audit kecurangan/fraud auditing, untuk menjadi Supreme Audit Institution (SAI) yang lebih kompeten, khususnya di bidang audit investigasi sebagaimana yang tertuang dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Untuk mendukung hal tersebut, di tempat yang sama pada tanggal 5 s.d. 6 September 2019 dilaksanakan diklat Fraud Auditing yang diikuti oleh 30 orang pemeriksa. Bertindak selaku instruktur yaitu Bapak Lukman Hakim S.ST., Ak., CFE, QIA, CA selaku Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menerapkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan saat melaksanakan pemeriksaan.

### Redaksi

**Penanggung Jawab** : Ade Iwan Ruswana  
**Redaktur** : Mardiah  
**Editor** : Bambang Budi Purwanto  
**Web Admin** : Dica Surya Cardina  
**Web Developer** : Achmad Anshari  
**Desain Grafis** : David Fernando Napitupulu  
**Fotografer** : Muys  
**Pembuat Arikel** : Artha Magdalena Sitanggang  
**Sekretariat** : Nurul Latifah

## RAPAT PEMBAHASAN PEMUTAKHIRAN FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) DAN PEMBAHASAN USULAN KEBIJAKAN PEMERIKSAAN LKPD TA 2019

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku tuan rumah kegiatan Pokja LKPD beserta AKN VI menyelenggarakan Rapat Pembahasan Pemutakhiran Frequently Asked Questions (FAQ) Dan Pembahasan Usulan Kebijakan Pemeriksaan LKPD TA 2019. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu - Jumat, 28 - 30 Agustus 2019 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan diikuti oleh 18 (Delapan Belas) Perwakilan Wilayah Timur. Acara dibuka oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN VI, Bapak M. Rizal Assiddiqie. Rapat Pembahasan tersebut menghasilkan:

- 1.daftar permasalahan LKPD di wilayah timur;
- 2.tambahan Frequently Asked Questions (FAQ) dari Pokja LKPD;
- 3.kebijakan dan teknis pelaksanaan reviu opini pemeriksaan LKPD TA 2019.



Acara ditutup dengan sambutan Tortama KN VI, Bapak Dori Santosa. Dalam sambutannya, Beliau mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, seluruh pemeriksa dapat memiliki persamaan cara pandang dan persepsi terkait permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPD, meminimalisir perbedaan perlakuan antar pemeriksa, serta dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan secara tepat dalam pemeriksaan LKPD dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (Risk Based Audit Approach), yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pemeriksaan atas LKPD.

## PENGHARGAAN BADAN PUBLIK "MENUJU INFORMATIF" DARI KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Bertempat di lapangan Sanaman Mantikai, hari Sabtu, 17 Agustus 2019, Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur menyerahkan penghargaan Badan Publik "MENUJU INFORMATIF" kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade Iwan Ruswana. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih peringkat 1 Penghargaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam kategori Instansi Vertikal Instansi Vertikal. Penghargaan ini diterima setelah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjalani tiga tahap evaluasi, yaitu tahap pengisian kuesioner penilaian mandiri, tahap visitasi, dan tahap presentasi/ pemaparan badan publik.

Bagi BPK, penghargaan ini merupakan suatu prestasi sekaligus tantangan sehingga diharapkan Pusa Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini tentunya perlu dukungan dari setiap individu maupun elemen yang ada di BPK.

## UPACARA BENDERA HUT RI ke 74



Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke- 74 Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan upacara pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019, pukul 08.00 WIB, bertempat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, Bapak Ade Iwan Ruswana dan sebagai komandan upacara Bapak Suwito.

Upacara dilaksanakan dengan pengibaran bendera. Dalam upacara tersebut, petugas upacara membacakan naskah Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara. Selanjutnya, petugas upacara membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada upacara kali ini juga diberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai yang telah mengabdikan selama 10 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada acara tersebut, Inspektur Upacara membacakan sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Moermahadi Soerja Djanegara. Adapun Tema Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 adalah SDM Unggul Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI BPK turut membangun SDM-nya dengan peningkatan kompetensi melalui inisiatif strategis talent pool pada Renstra BPK, perluasan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), dan peningkatan kapabilitas pemeriksa di dunia internasional. Ketua BPK RI juga mengharapkan dan menekankan agar seluruh pegawai BPK senantiasa bekerja dengan kompak, bersinergi, penuh semangat, dan tetap memegang teguh integritas, independensi, serta profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Upacara ditutup dengan pembacaan doa.

## PERINGATAN IDUL ADHA PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bertempat di halaman Musholla BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Senin, 12 Agustus 2019, telah dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Kantor BPK perwakilan kepada Panitia Yayasan Yakesma yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sdr. Asep Kurniawan sebagai panitia kurban, dan acara dimulai pada pukul 07.30 pagi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Struktural dan beberapa pegawai BPK Perwakilan lainnya. Jumlah hewan yang dikurbankan adalah 3 ekor sapi dengan 21 orang yang berkorban. Selanjutnya hewan kurban akan disalurkan oleh Yayasan Yakesma ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Sedangkan beberapa, daging hewan kurban dibagikan kepada pegawai BPK dan masyarakat sekitar kantor, yang secara simbolis diserahkan oleh Kasubag SDM Bapak Guntur Yulianto. Acara dilanjutkan dengan silaturahmi dan makan bersama para Pegawai BPK Perwakilan pada sore harinya di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

